



SNIA[®]

SEMINAR NASIONAL INTERNAL AUDIT
WHAT'S DRIVING CHANGE
 to Stay Ahead of The Curve
 for Internal Auditors
 in The Coming Years ?

3-4 DESEMBER 2025 | THE STONES HOTEL, BALI



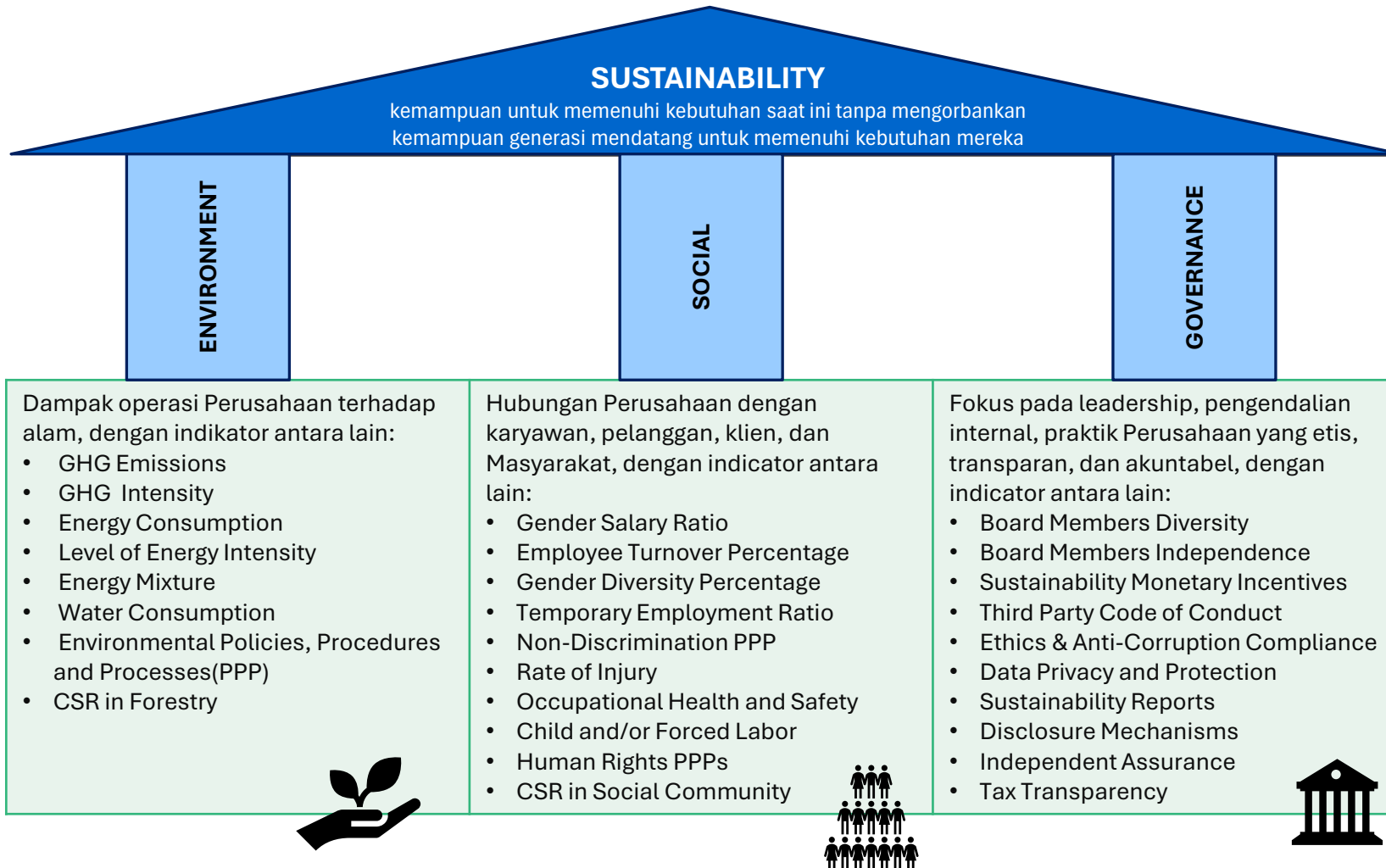
“ESG at the Core: Building Governance, Trust, and Sustainable Value”



Oleh:
Dewi Sukmawati

Disampaikan dalam Seminar Nasional Internal Audit
(SNIA) 2025
Bali, 3-4 Desember 2025

Konsep Dasar



Green Washing - klaim berlebihan praktik "ramah lingkungan" atau "netral karbon"

Blue washing – klaim berlebihan praktik sosial berfokus pada perekonomian masyarakat

ESG Washing - klaim berlebihan praktik ESG

Green Financing – pendanaan untuk proyek/aktivitas ramah lingkungan dan berkelanjutan

Principle of responsible banking – praktik perbankan yang selaras dengan SDGs dan Paris Agreement

IDN – 5 bank (BSI, Bank Jago, BNI, BTN, Bank Aladin Syariah)



Source: Web UNEP – FI yang diunduh 1 Des 2025

Green bonds – instrumen hutang untuk pendanaan project yang berkontribusi positif bagi lingkungan dan iklim

Blue bonds – instrumen hutang untuk pendanaan project berbasis kelautan yang memiliki manfaat lingkungan, ekonomi, dan iklim yang positif (konservasi laut, sustainable fishery, proyek air bersih)

Isu ESG

ENVIRONMENT	SOCIAL	GOVERNANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran (sungai, laut, udara, tanah) • Deforestasi dan alih fungsi lahan • Sampah • Kerusakan ekosistem • Penyempitan daerah resapan air • Bencana alam (banjir, erosi, longsor, kebakaran lahan gambut) • Perubahan iklim • Kelangkaan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskriminasi • Rendahnya kualitas pendidikan dan kesenjangan akses pendidikan • Terbatasnya pelayanan kesehatan masyarakat • Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meningkat • Kesenjangan sosial dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkonsistensi kebijakan • Ketidakselarasan kebijakan • Birokrasi yang rumit dan lambat • Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) • Konflik kepentingan • Kurangnya transparansi dan akuntabilitas • Kurangnya kepatuhan kepada regulasi • Lemahnya pengendalian internal
<p>Pemicu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidaktegasan penegakan hukum • Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan • Populasi penduduk yang terus meningkat • Tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat • Fokus pada profit jangka pendek • Persepsi perusahaan mengenai mahalnya penerapan ESG • Lemahnya pengawasan, baik dari internal maupun eksternal 		



Concern Stakeholders



Penerapan prinsip-prinsip ESG oleh pelaku usaha
Dukungan kebijakan pemerintah



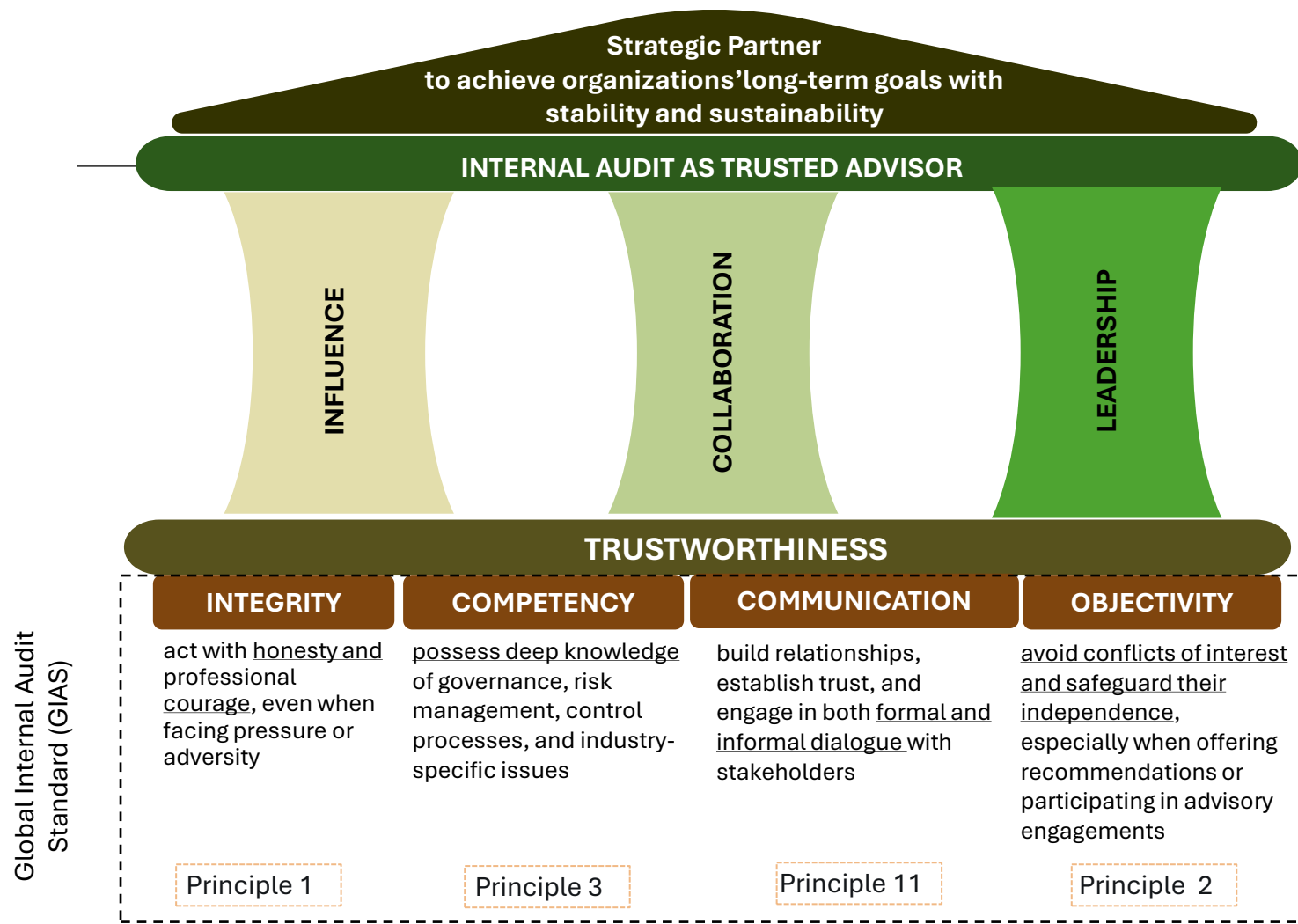
PERFORMANCE
Standar?
Pelaporan?
Rating?



DATA?



Peran Internal Auditor



Assurance services

Perform objective assessments to provide assurance to increase stakeholders' confidence about an organization's governance, risk management and control processes over an issue, condition, subject matter, or activity under review

Advisory services

Provide advise to organization's stakeholders without providing assurance or taking on management's responsibilities. The nature and scope of advisory services are subject to agreement with relevant stakeholders.

1st Step – Compliance

Assurance Services

1. Apakah Perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan terkait ESG
2. Apakah peraturan internal Perusahaan telah selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait ESG

Environment	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup• PP No. 26 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup• Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)• Permen LH No. 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Social	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan• Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Governance	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas• Permen BUMN No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara• PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD
Sustainability	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.• POJK 60/POJK.04/2017 tentang Green Bond• POJK 18/2023 tentang Efek Berbasis Keberlanjutan• POJK 14/2023 tentang Perdagangan Karbon.



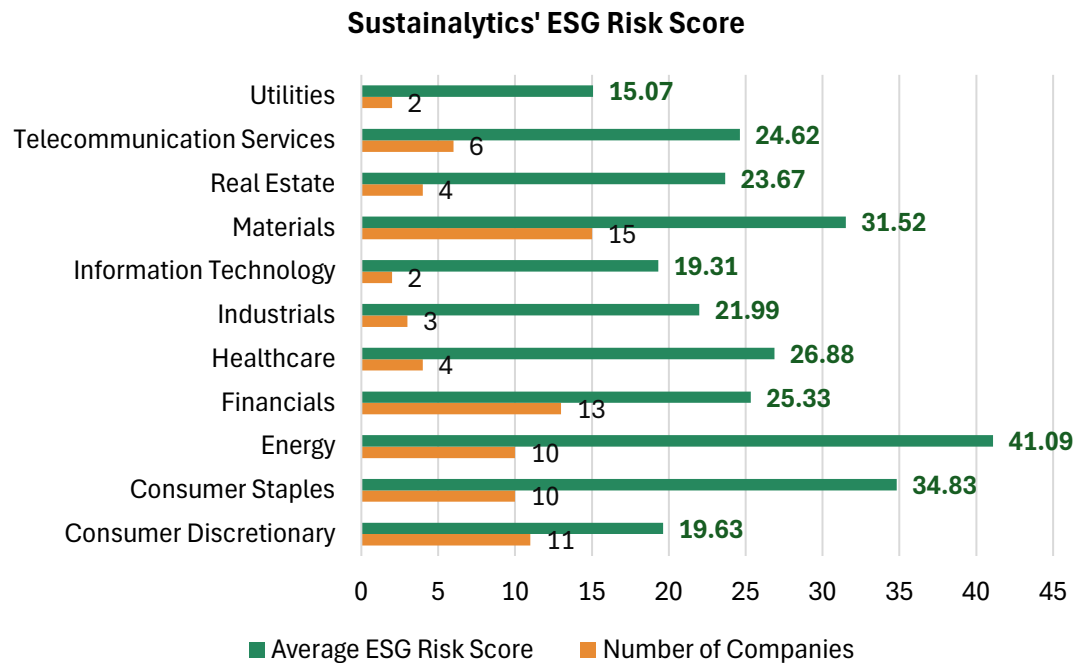
Hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Tidak ada satu pun peraturan yang secara khusus menegaskan atau mengatur soal ESG
2. Prinsip – prinsip ESG diadopsi dan tersebar di berbagai peraturan
3. Perlu jeli dan paham regulasi yang mengikat perusahaan

2nd Step – Risk Based

Assurance
Services

1. Apakah taksonomi risiko Perusahaan telah mencakup risiko terkait ESG
2. Apakah risiko terkait ESG telah diidentifikasi, diukur, diprioritaskan, dan dikelola
3. Jika telah dikelola, bagaimana pengelolaan risiko ESG tersebut
4. Adakah *room for improvement* dalam pengelolaan risiko ESG

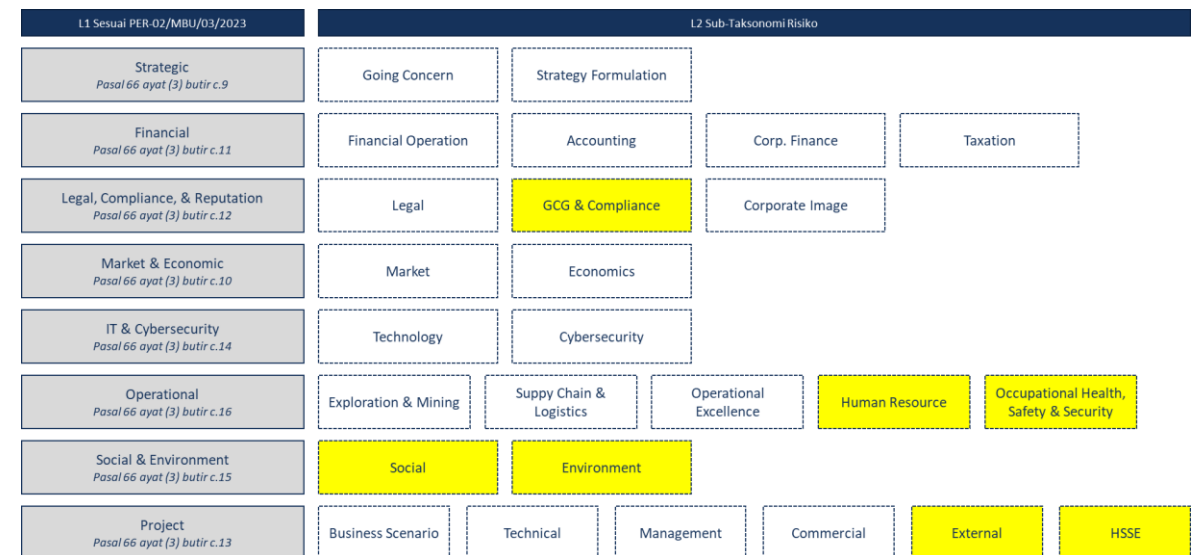


Catatan:

- Nilai Risiko ESG merupakan ukuran eksposur perusahaan terhadap risiko ESG yang material dan seberapa baik perusahaan mengelola risiko tersebut
- **Higher is worse:** Skor yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar bahwa faktor-faktor ESG dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara negatif. (>40 severe - memiliki risiko ESG yang berat)
- Source : data diolah dari <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/nilai-esg>

Risiko ESG umumnya tersebar dalam beberapa kategori risiko
Perlu pemahaman mengenai definisi dan rincian risiko dalam kategori yang relevan dengan prinsip ESG

Contoh taksonomi risiko:

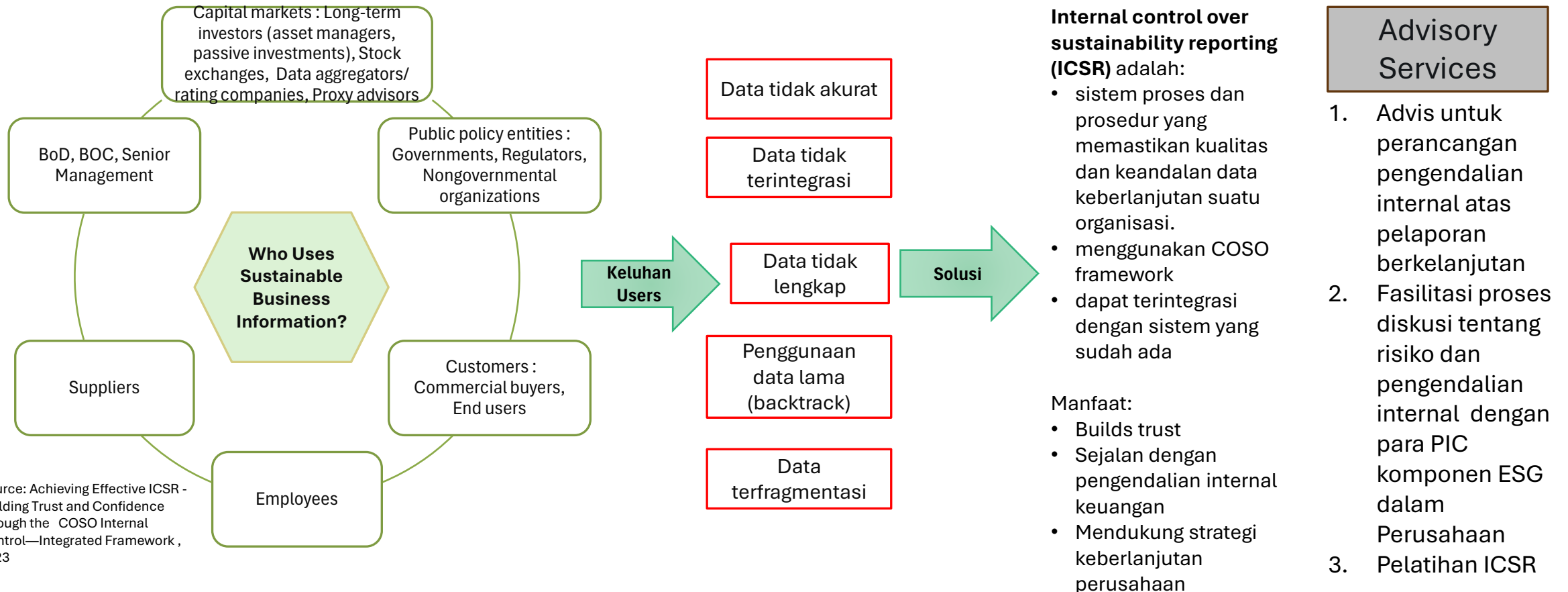


Source: Taksonomi risiko MIND ID

Value Added – Catalyst for ICSR Implementation

OJK mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan publik untuk membuat Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang diumumkan kepada masyarakat dengan memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mengharuskan laporan ESG diaudit oleh pihak ketiga yang independen.

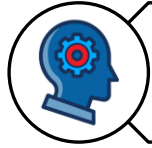


Source: Achieving Effective ICSR - Building Trust and Confidence through the COSO Internal Control—Integrated Framework, 2023

Lesson Learned & Reflection



Komitmen Pimpinan (BoD dan BoC) untuk secara eksplisit mensupport pentingnya integritas data ESG yang ditunjukkan dengan leading by example, kode etik, pemenuhan sumber daya yang cukup



Penetapan owner data ESG harus jelas



Akurasi data ESG perlu dihasilkan melalui proses pengendalian internal yang reliable



Penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan yang sesuai regulasi dan adaptasi best practices

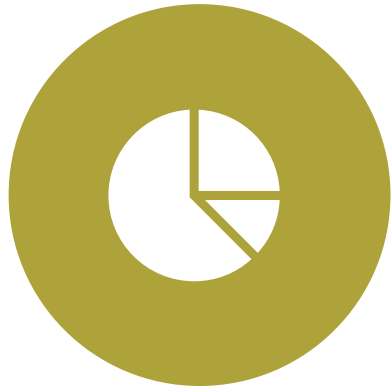


Perlunya digitalisasi proses pelaporan ESG sejak pengumpulan, konsolidasi, dan validasi secara berjenjang



Komunikasikan kinerja ESG secara jujur dan beretika





TERIMA KASIH



MATUR SUKSMA



THANK YOU